ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Eksistensi Yuridis Tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro (Studi Analisis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota)" ini ditulis oleh Joko Purnomo, NIM. 12103183005, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022, di bimbing oleh Dr. H. M. Darin Arif Mu'alifin, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: *Peraturan Gubernur, PSBM, Covid-19, Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan wabah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat Pemerintah melakukan sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya penanggulangan wabah. Pada hakikatnya, telah terdapat sejumlah tindakan penanggulangan wabah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi, Presiden secara langsung menyatakan bahwa pembatasan sosial berskala mikro jauh lebih efektif sebagai upaya untuk menanggulangi wabah. Oleh karena itu, ungkapan tersebut menjadikan Kepala Daerah Jawa Barat membentuk regulasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Nomor 48 Tahun 2020 untuk dijadikan sebagai landasan pengaturan pembatasan sosial berskala mikro. Namun persoalanya adalah konsep pembatasan sosial berskala mikro belum mempunyai dasar hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum yang mana segala tindakan Pemerintah berdasarkan pada peraturan, regulasi yang mengatur PSBM selayaknya juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek formil pembentukanya maupun aspek materiil substansinya.

Fokus penelitian ini tentang eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dengan pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam peraturan perundang-undangan. 2) bagaimana eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam peraturan perundang-undangan. 2)

untuk mengetahui eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisikan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif *(analyis descriptive)* dengan pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*.

Hasil penelitian Eksistensi Yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomot 48 Tahun 2020 Berkaitan Dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro adalah: 1) pembentukan regulasi penanggulangan wabah pandemi Covid-19 melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Coronavirs Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten/Kota telah bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan peraturan kepala daerah harus memuat dua persyaratan yaitu diperintahkan/didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk oleh kepala daerah. Selain itu, materi yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat telah bertentangan dengan materi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta sanksi administratif tidak dimuat secara tegas kaitanya dengan isinya, sehingga tampak bahwasanya Peraturan Gubernur tersebut cacat secara formil pembentukanya dan cacat materiil substansinya. 2) pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 apabila ditinjau dari perspektif fiqih siyasah *(siyasah dusturiyah)* memiliki konseptual yang sama. Hal ini dikarenakan titik pandang fiqih siyasah lebih mengutamakan pada konsep kemaslahatan umat. Islam sangat mengutamakan keselamatan jiwa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi wabah penyakit setiap orang dilarang untuk keluar masuk wilayah yang terpapar wabah penyakit, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.

ABSTRACT

Thesis by the title "Juridical Existence Regarding Micro-Scale Social Restrictions (Analysis Study of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Micro-Scale Social Restrictions in Combating Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Regency/City Areas)" was written by Joko Purnomo, Registered University Student 12103183005, Department of State Law, State Islamic University of Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022, guided by Dr. H.M. Darin Arif Mu'alifin, S.H, M.Hum.

Keywords: *Governor Regulation, PSBM, Covid-19, Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Background of this research was by the problem of the Covid-19 pandemic outbreak that occurred in Indonesia, making the Government carried out a number of strategic policies as an effort to overcome the outbreak. In fact, there had been a number of outbreak response measures in the Indonesian state system, including home quarantine, regional quarantine, hospital quarantine and large-scale social restrictions. However, the President directly stated that micro-scale social restrictions are much more effective as an effort to overcome the outbreak. Therefore, the expression makes the Head of West Java Region form regulations through Java Governor Regulation Number 48 of 2020 to be used as a basis for micro-scale social restriction arrangements. But the problem was that the concept of micro-scale social restrictions did not yet have a legal basis that expressly regulates it in laws and regulations. As a legal state where all government actions were based on regulations, regulations governing PSBM should also be subject to laws and regulations, both in aspects of formil formation and material aspects of its substance.

The focus of this research were on the juridical analysis of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 with the following performance: 1) how the juridical existence of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 was related to Micro-Scale Social Restrictions in laws and regulations. 2) How the juridical existence of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 related to Micro-Scale Social Restrictions in the perspective of *siyasah fiqh dusturiyah*.

The purposes of this research were: 1) to find out the juridical existence of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 relating to Micro-Scale Social Restrictions in laws and regulations. 2) to find out the juridical existence of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 relating to Micro-Scale Social Restrictions in the perspective of *siyasah fiqh dusturiyah*.

The research method used was normative legal research that was descriptive analytical. The research used secondary data sources containing primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is technical descriptive analysis *(analyis descriptive)* with a statutory approach *(statue approach).*

The results of the Juridical Analysis of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 Relating to Micro-Scale Social Restrictions are: 1) the establishment of regulations to overcome the Covid-19 pandemic outbreak through West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 was considered to have conflicted with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. This caused by the formation of the regional head regulation had to contain two statements, namely ordered / delegated by higher regulations and formed by the regional head. In addition, the material contained in the West Java Governor's Regulation has conflicted with the material contained in Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, so it appeared that the Governor's Regulation was defective in its formation and material defects of its substance. 2) The establishment of West Java Governor Regulation Number 48 of 2020 when viewed from the perspective of fiqh siyasah *(siyasah dusturiyah)* did not present complex problems. This caused the point of view of fiqh siyasah dusturiyah prioritizes the concept of the benefit of the people. Islam prioritized the salvation of the soul, as had been taught by the Prophet Muhammad SAW in the face of disease outbreaks everyone was forbidden to go in and out of areas exposed to disease outbreaks, it was solely aimed at benefit and stayed away from prosperity.

الملخص

البحث العلمي بالموضوع "الطروحة بعنوان الغربية رقم ٤٨ لعام٢٠٢٠ بشان المبادئ التوجيهية لتنفيذ القيود الاجتماع ية على نطاق صغير في التعامل مع مرض فيروس بقلم جوكو بورنومو ,نيم ١٢١٠٣١٨٣٠٠٥ برنامج دراسة "قد كتب جاكا فورنامى وعلى رقم القيد الطالب 12103183005 و لقسم حكوم البلدية و المشرف الدكتور الحج محمد دارن عارف معلّف الماجستير.

الكلمات الإرشاد: قانون الوالي الجوى الغربية و تحديد الإجتماعي المقياس الأقلّ و كوفيد-19 و فقه السياسة (سياسة الدستورية)

هذا البحث يكون خلفيةً من مسألة الوباء كوفيد-19 الّذي قد جرى في إندونيسيا حيث حاز الحكم لعمل السياسات الجوهرية كسعي التثبيت الوباء. و في الجوهر، كان هناك عدد من تدبير مكافحة تفشي المرض في النظام الدستوري الإندونيسي بما في ذلك الحجر الصحي المنزلي و الحجر الصحي الإقليمي و الحجر الصحي في المستشفيات و القيود الاجتماعية الواسعة النطاق. ومع ذلك، صرح الرئيس مباشرة أن القيود الاجتماعية على نطاق صغير كانت أكثر فعالية كمحاولة لاحتواء تفشي المرض. و لذلك أن يكون رأس الولاية الجوى الغربية تأليف القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 لتكوّن الجوهر على قانون التحديد الإجتماعي المقياس الأقلّ. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن مفهوم القيود الاجتماعية على نطاق صغير ليس له بعد أساس قانوني ينظم ذلك صراحة في القوانين واللوائح. وكدولة قانونية تستند فيها جميع الإجراءات الحكومية إلى لوائح تنظيمية، ينبغي أن تخضع الأنظمة التي تحكم القيود الاجتماعية على نطاق صغير للقوانين والأنظمة، سواء في الجوانب الرسمية لتكوينها أو في الجوانب المادية لمضمونها.

هذه مسائل البحث عن القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 بالأسئلة كما يلي: 1) كيف وجود القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل في الدستور 2) كيف وجود القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل في فقه السياسة.

أمّا هذا أهذاف البحث كما يلي: 1) لمعرفة وجود القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل في الدستور 2) لمعرفة وجود القنون

الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل في فقه السياسة.
الطريقة الّتي استعملت في هذا هي يحث القانونية المعيارية ذات الطبيعة الوصفية التحليلية. تستخدم هذه الدراسة مصادر بيانات ثانوية تحتوي على مواد قانونية أولية وثانوية وثالثة. تحليل البيانات المستخدم هو تقنية التحليل الوصفي (التحليل الوصفي) مع نهج قانوني.
حصيلة البحث من القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 بالأسئلة كما يلي:
1) يعتبر وضع لوائح للتعامل مع تفشي جائحة كوفيد-19 من القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل متناقضًا مع القوانين واللوائح السائدة في إندونيسيا. وذلك لأنه عند تشكيل لائحة إقليمية للرؤساء، يجب أن تحتوي على شرطين، وهما الأمر أو التفويض من قبل لائحة أعلى وتشكيل من قبل الرئيس الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، تتعارض المواد الواردة في لائحة حاكم ولاية جاوة الغربية مع المواد الواردة في القانون رقم 6 لعام 2018 بشأن الحجر الصحي، لذلك يبدو أن لائحة الحاكم معيبة رسميًا في تشكيلها ومعيبة ماديًا من حيث الجوهر.
2) إن إنشاء القنون الوالي الجوى الغربية رقم 48 سنة 2020 عن تحديد الإجتماعي المقياس الأقل عند النظر إليها من منظور فقه السياسة (سياسة الدستورية) لا يمثل مشاكل معقدة. وذلك لأن وجهة نظر الفقه السياسي تعطي الأولوية لمفهوم منفعة الناس. يعطي الإسلام الأولوية لسلامة الروح، كما علمه النبي محمد صلى الله عليه و سلّم في التعامل مع تفشي الأمراض، يُمنع الجميع من دخول وخروج المناطق المعرضة لتفشي الأمراض، وهو يهدف فقط إلى الاستفادة وتجنب الضرر.